

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi, sangat penting untuk memastikan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Berikut adalah strategi dan metode pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring yang diterapkan:

I. Pembinaan

Pembinaan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas bagi PPID Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

1) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

Menyelenggarakan/mengikuti pelatihan bagi PPID dan Petugas Pelayanan Informasi untuk memahami prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan Teknik komunikasi yang efektif.

2) Pengembangan Panduan Internal

Membuat panduan mengenai proses permohonan informasi, batas waktu respons permohonan, dan pedoman praktis lainnya bagi PPID dan Petugas Pelayanan Informasi.

II. Pengawasan

Pengawasan bertujuan untuk memastikan PPID Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1) Audit Internal

Melakukan audit internal terhadap kinerja PPID dan Petugas Pelayanan Informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik.

2) Mekanisme Pelaporan

Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik. menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi Masyarakat.

III. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah diterapkan.

1) Survei Kepuasan Masyarakat

Melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID dan Petugas Pelayanan Informasi.

2) Evaluasi Kinerja

Menilai kinerja PPID dan Petugas Pelayanan Informasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam proses pelayanan informasi dan merumuskan tindakan perbaikan.

IV. Monitoring

Monitoring berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kebijakan informasi publik secara berkala. Pemantauan Proses Permohonan Informasi memantau proses permohonan informasi untuk memastikan bahwa batas waktu respons terpenuhi. Monitoring Ketersediaan Informasi Publik, memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh Masyarakat.

V. Implementasi Teknologi Informasi

- 1) Menggunakan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi secara online.
- 2) Mengembangkan Portal Informasi Publik yang menyediakan informasi secara digital dan dapat diakses oleh Masyarakat.

VI. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Monitoring

Setelah Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring dilakukan perlu adanya tindak lanjut untuk perbaikan kedepan agar pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik berjalan dengan baik.

- 1) Revisi Kebijakan atau SOP: Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, maka perlu dilakukan revisi terhadap kebijakan atau SOP yang ada.
- 2) Program Perbaikan Layanan: Menyusun program-program perbaikan layanan berdasarkan hasil evaluasi, seperti penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan SDM, atau penambahan alur layanan yang lebih mudah diakses.
- 3) Dengan strategi dan metode di atas, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Petugas Pelayanan Informasi dapat terjaga kualitasnya dan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.